

# MEMBANGUN KEKUATAN PERTAHANAN

Wahyono S.K.<sup>\*)</sup>

*Pembangunan kekuatan pertahanan kita sejauh ini hanya berupa wacana yang tidak kunjung menjadi kenyataan. Banyak orang tidak memahami akan pentingnya sebuah angkatan bersenjata bagi suatu negara, tidak saja sebagai perangkat untuk melindungi keamanan bangsa, tetapi juga sebagai lambang kedaulatan negara.*

*Sepertinya ada persepsi yang tidak beres dalam masyarakat kita. Meskipun kita sudah merdeka lebih dari setengah abad, tetapi masyarakat masih tetap hidup dengan persepsi jaman penjajahan dulu, yaitu ada pemerintah yang menjajah dan ada masyarakat yang dijajah, serta tentara adalah kompeni yang menindas rakyat. Oleh karena itu meskipun kita sudah mempunyai pemerintahan yang presidennya dipilih langsung, masyarakat tetap mengambil posisi melawan pemerintah. Semua yang diperbuat pemerintah ditentang, bahkan yang baikpun dilawan sebagai kebijakan yang salah. Melawan pemerintah dianggap sebagai suatu perbuatan yang heroik.*

*Di sinilah letaknya maka angkatan bersenjata dianggap dan diperlakukan sebagai aparat pemerintah untuk menekan dan menindas masyarakat, maka harus dikerdilkan peranannya dalam masyarakat, meskipun yang dilakukan oleh prajurit kita di waktu damai di saat jeda latihan adalah program prajurit masuk desa atau karya bakti yang lain, yang maksudnya untuk mendayagunakan kemampuan yang berlebih untuk membantu meringankan beban masyarakat, selain untuk semakin mendekatkan prajurit kepada rakyat.*

## **Ancaman Multi Dimensi**

Sekarang ini selain ada ancaman global kenaikan harga bahan energi dan bahan pangan serta perubahan cuaca yang ber-

dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dunia, di depan mata kita juga ada masalah pelanggaran garis batas wilayah negara, ada pencurian sumber alam,

---

<sup>\*)</sup> Wahyono S.K., Ph.D., Pemimpin Umum Majalah Telestra Lemhannas Jakarta.

ada kejahatan terorganisasi transnasional, baik penyelundupan kekayaan alam, narkoba, perempuan dan anak-anak, juga ada perongrongan terhadap ideologi negara, ada terorisme dan lain-lain.

Itu semua adalah ancaman nyata bersifat multi dimensi yang sekarang benar-benar kita hadapi dan tidak bisa kita biarkan begitu saja, karena keamanan nasional kita akan terganggu. Ada ancaman yang harus ditangani oleh aparat intelijen, ada yang harus ditangani oleh aparat pertahanan, ada yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum, ada yang harus ditangani oleh aparat pemerintah dan ada yang harus ditangani oleh masyarakat sendiri. Hampir semua negara berusaha untuk menegakkan dan memelihara keamanan nasional, karena: "*The prime function of any national state are the protection of the population from external dangers and the maintenance of internal order and stability... The search for national security is a common element in the behavior of most states*". (E.J. Meehan, *The Dynamics of Modern Government*, 1996).

Di masa yang lalu ancaman itu berbentuk fisik seperti invasi militer, tetapi sekarang ancaman itu dapat datang dari sekelompok orang tanpa mewakili suatu negara (*non state actors*) dengan

sasaran acak di tengah masyarakat yang disebut teror. Strukturnya asimetri dan sifatnya transnasional. Ancaman seperti ini hanya dapat dihadapi oleh aparat intelijen. Belum lagi ancaman di dunia maya yang secara serentak dapat datang dari seluruh penjuru dunia, yang di atas permukaan tidak tampak, tetapi dapat menggerakkan opini seluruh dunia, bahkan dapat memicu pembontakan atau melepas wilayah suatu negara.

Seluruh aparat penanggulangan ancaman, baik untuk menghadapi ancaman fisik maupun non-fisik itu harus kita miliki, kita bangun dan kita siagakan sedini mungkin. Bahkan masyarakat juga harus kita siapkan untuk mempunyai kemampuan bela negara melalui wajib latih dan wajib militer. Semua itu kita siapkan secara bertahap dengan suatu perencanaan jangka panjang yang menyeluruh, bertingkat dan bertahap dengan dana yang dianggarkan secara teratur dan berlanjut setiap tahunnya.

### **Anggaran Belanja Pertahanan**

Kebijakan fiskal negara-negara maju atau yang sudah mapan dari statistik yang dapat dibaca dari laporan tahunan UNDP (*United Nations Development Program*) tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega-

ra) negara-negara tersebut, rata-rata memanfaatkan 40%-60% dari PDB (Produk Domestik Bruto) tahunannya untuk APBN-nya. APBN yang kurang dari 40% PDB itu tanda negara itu belum dapat memanfaatkan sumber dayanya secara penuh. Dari 60% PDB tersebut dialokasikan secara konsisten 6% PDB untuk kesehatan, 6% PDB pendidikan dan 3% PDB untuk pertahanan. Sisanya yang 45% PDB untuk belanja pegawai dan belanja pemerintah yang lain.

Alokasi 3% dari PDB untuk sektor pertahanan itu secara akumulatif apabila dilakukan dengan teratur dalam waktu 10-15 tahun akan dapat memenuhi kebutuhan minimal kekuatan pertahanan. Di awal Orde Baru alokasi untuk belanja pertahanan adalah 3,5% dari PDB, tetapi kemudian terus disusutkan sehingga sekarang tinggal 1% dari PDB.

Di luar anggaran yang 3% dari PDB yang setiap tahun disediakan untuk pertahanan, juga diperlukan anggaran 1,5% dari PDB untuk setiap tahun disediakan bagi industri pertahanan agar PT PINDAD, PT PAL, PT DIRGANTARA INDONESIA dan PT DAHANA setiap tahun dapat beroperasi dan memproduksi mencukupi kebutuhan aparat pertahanan. Dana 1,5% PDB yang setiap tahun dianggarkan

untuk keempat BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Strategis itu adalah dana untuk membiayai pesanan pemerintah atas sejumlah peralatan dan persenjataan berdasarkan perencanaan jangka panjang yang terpadu yang disusun bersama oleh Departemen Pertahanan dan Markas Besar Angkatan Darat, Laut dan Udara.

Industri pertahanan di negara-negara berkembang tidak dapat disamakan dengan industri pertahanan negara-negara maju yang dapat menghasilkan keuntungan dari ekspor ke negara-negara berkembang. Dengan membuat industri-industri pertahanan itu terus beroperasi, tidak hanya kebutuhan peralatan dan persenjataan aparat pertahanan dapat dipenuhi, tetapi juga terdidiknya tenaga kerja yang menguasai teknologi maju, yang juga diperlukan untuk mengembangkan industri-industri yang lain, termasuk untuk penelitian dan pengembangan, dan itu adalah aset yang luar biasa besar bagi negara.

### **Pembangunan dengan Pendekatan Tugas**

Pembangunan aparatur pertahanan tidak harus dengan pendekatan ancaman atau dengan pendekatan kapabilitas seperti banyak dilakukan negara-negara besar, tetapi dapat le-

bih sederhana, yaitu dengan pendekatan tugas harian yang harus dapat dilaksanakan oleh aparat pertahanan dengan kekuatan minimal. Sumbernya adalah amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah".

Aparat pertahanan itu secara minimal harus dapat menjaga keamanan daerah dan garis batas wilayah negara di darat, di laut dan di udara. Kita mempunyai garis batas wilayah darat yang panjang, yaitu yang berhadapan dengan Malaysia dan Papua Nugini, demikian pula garis batas wilayah laut dan udara yang luasnya sekeliling Kepulauan Indonesia, seluas kurang lebih 3 juta km<sup>2</sup> daratan pulau-pulau dan 6 juta km<sup>2</sup> laut. Garis batas wilayah itu setiap saat harus dijaga, baik dengan penginderaan satelit, dengan peralatan elektronik lain, maupun dengan menghadirkan aparat pertahanan darat, laut dan udara secara berkala dalam tugas-tugas patroli rutin. Setiap saat harus ada aparat pertahanan kita yang hadir di daerah perbatasan, di darat, di laut dan di udara sebagai simbol kedaulatan negara kita. Khusus untuk angkatan laut harus selalu hadir di Selat Malaka dan di sepanjang tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu Laut Cina

Selatan - Selat Sunda, Selat Makasar - Selat Lombok dan Laut Maluku - Selat Ombai - Wetar.

Dari luas wilayah dan panjang garis batas wilayah negara dengan mudah kita bisa menghitung berapa jumlah dan macam kekuatan yang kita perlukan untuk melaksanakan patroli rutin di wilayah darat, laut dan udara tersebut. Kita semua harus menyadari bahwa wilayah negara kita memang luas, panjangnya seperti dari London sampai ke Istanbul, dan kita wajib menjaganya dengan baik. Pada tahap awal yang kita perlukan memang kuantitas untuk mencapai kekuatan minimal yang diperlukan, baru kemudian secara bertahap kita tingkatkan kualitasnya sesuai perkembangan teknologi.

Pasukan darat yang ditugasi menjaga garis batas wilayah negara mengingat panjangnya, haruslah dilengkapi kendaraan tempur angkut pasukan dan helikopter sehingga mobilitas pasukan tinggi. Patroli di laut dapat dilakukan oleh kapal-kapal patroli yang besarnya disesuaikan dengan kondisi wilayah laut, untuk laut teritorial ditugaskan kepada kapal-kapal patroli berbobot 300-400 ton, sedangkan untuk laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) ditugaskan kapal-kapal berbobot 1000-2000 ton. Di

udara disiagakan pesawat-pesawat patroli maritim yang dapat mengawasi udara dan laut serta berkomunikasi dengan kapal-kapal patroli di laut.

Semua peralatan dan persenjataan pasukan darat, laut dan udara tersebut di atas saat ini sudah bisa disediakan oleh PT PINDAD, PT PAL, PT DIRGANTARA INDONESIA dan PT DAHANA. Semua peralatan dan persenjataan patroli rutin darat, laut dan udara sudah dapat disediakan di dalam negeri, sehingga tidak tergantung kepada pihak asing yang sering merugikan karena penggunaan sanksi embargo.

### Kekuatan Deterrence

Namun demikian untuk menjaga kedaulatan negara, kemerdekaan bangsa dan kewibawaan pemerintah dari pelecehan oleh negara lain, kita perlu memiliki kekuatan pertahanan yang walaupun minimal tetapi memiliki faktor *deterrence* yang besar dengan teknologi yang maju dan persenjataan yang memadai, seperti pesawat pemburu-pembom jarak jauh yang secara kilat dapat diterbangkan untuk membombardir jantung ibu kota negarane-negara yang mempunyai itikad tidak baik terhadap negara kita. Dalam waktu beberapa jam saja tugas itu harus sudah dapat diselesaikan dengan baik sebagai

suatu *preemptive strike* untuk menghentikan niat jahat negara yang tidak bersahabat.

Sebagai dukungan bagi kesatuan pemburu-pembom strategik itu disiapkan beberapa kesatuan pasukan marinir yang siap untuk didaratkan dari laut, demikian pula beberapa kesatuan pasukan para komando yang siap diterjunkan dari udara di posisi-posisi strategik di wilayah musuh apabila diperlukan, sebagai tindakan lebih lanjut setelah serangan pesawat pemburu-pembom. Serangan dukungan itu harus dapat dilakukan secara cepat pula.

Untuk kekuatan *deterrence* ini peralatan dan persenjataannya harus sudah disesuaikan dengan teknologi yang muktahir, namun dipilih dari negara-negara yang tidak memberi ikatan tertentu dan relatif murah. Jika keuangan mengijinkan perlu dipikirkan untuk juga memiliki kapal selam yang mampu menembakkan roket dan torpedo kendali dari jarak jauh *over the horizon*.

Tentang pentingnya keberadaan kekuatan yang *deterrence* itu karena: "*No state incapable of waging effective war can reasonably expect other states to meet its demands, heeds its wishes or even acknowledge its right to survival ...*". (F.L. Schuman, *International Politics*, 1958).

## Wajib Latih dan Wajib Militer

Hal yang paling penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan adalah penyiapan tenaga prajuritnya, *the men behind the guns*. Pada umumnya ditempuh dua jalur, yaitu jalur tentara sukarela dan jalur tentara wajib. Kombinasi keduanya adalah pilihan yang terbaik karena membuat institusi tentara akrab dengan masyarakat. Wajib militer dapat ditempuh dalam dua tahap, yaitu dimulai dengan wajib latih yang berlaku untuk semua warga negara yang berumur 18 tahun, kemudian dari yang lulus diseleksi lagi untuk yang dapat diberikan wajib militer selama dua tahun.

Wajib latih dan wajib militer adalah bagian dari *nation and character building* dan bukan kepentingan militer semata-mata. Melalui wajib latih dan wajib militer akan menjadikan angkatan bersenjata *alma mater* dari setiap warga negara, sehingga tidak ada lagi jarak antara tentara dengan masyarakat. Di samping itu pengalaman selama dua tahun menjalani wajib militer akan membuat setiap pesertanya memiliki percaya diri, disiplin dan etos kerja dengan *fighting spirit* yang tinggi, yang diperlukan bagi setiap tenaga kerja yang dibutuhkan dunia industri dan lapangan pekerjaan yang lain. Hampir semua negara industri

yang sekarang besar tumbuh setelah melaksanakan wajib militer, bahkan negara seperti Swiss yang tidak pernah perang dan tidak punya musuh, semua rakyatnya menolak untuk menghapuskan wajib militer ketika diadakan *referendum* beberapa tahun yang lalu. Wajib militer adalah sarana pendidikan bagi para calon pemimpin bangsa.

Di luar perkiraan banyak orang, bahwa wajib latih dan wajib militer hanyalah merupakan pemborosan anggaran belanja negara, tetapi tidak pernah terpikirkan bahwa kedua kegiatan itu akan memerlukan dukungan logistik yang luas dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Sekiranya setiap tahun ada 1% dari jumlah penduduk Indonesia yang memasuki usia 18 tahun, maka itu berarti ada kurang lebih 2,5 juta warga negara muda yang harus menjalani wajib latih dasar keprajuritan yang lamanya antara 2-3 bulan. Apabila tiap peserta wajib latih satu bulan memerlukan biaya Rp 3 juta, maka untuk pelatihan selama 3 bulan untuk 2,5 juta orang akan diperlukan biaya Rp 22,5 triliun. Jumlah itu tidak berarti untuk APBN kita, apalagi jika yang bocor dapat dihilangkan sehingga dananya dapat langsung digunakan untuk melaksanakan wajib latih dan wajib militer.

Jika di tiap provinsi ada satu

tempat pelatihan bagi peserta wajib latih yang dapat menampung 300 orang dan setiap tempat pelatihan buka tiga kali setahun, maka dari Sabang sampai Merauke diperlukan 33 tempat pelatihan yang bersifat permanen, karena kegiatan pelatihan itu akan terus berlangsung sepanjang tahun sepanjang masa. Akan ada kebutuhan pembangunan besar-besaran tempat pelatihan, penyediaan instruktur militer, personil administrasi sipil, *supplier* perlengkapan prajurit dan makanan. Akan tumbuh industri persenjataan dan perlengkapan prajurit. Kalau para peserta wajib latih itu kemudian mengikuti wajib militer dan ditempatkan di sepanjang garis batas wilayah negara, maka itu berarti harus dibangun pula asrama, pos-pos penjagaan dan jalan beraspal di sepanjang garis batas di Kalimantan, Papua dan Timor serta di pulau-pulau terluar. Kegiatan ekonomi akan *snow-balling*.

Barangkali hanya kurang dari sepertiga peserta wajib latih yang nantinya secara bergiliran akan dipanggil untuk menjalankan wajib militer selama dua tahun, yaitu yang memenuhi persyaratan untuk menjadi prajurit reguler saja, sedangkan selebihnya

akan berstatus prajurit cadangan. Bagi yang nantinya meneruskan ke universitas dapat langsung bergabung dalam resimen mahasiswa.

Para wajib militer yang telah menyelesaikan tugasnya dapat kembali ke masyarakat sebagai tenaga kerja yang berdisiplin dan beretos kerja tinggi atau kembali ke bangku sekolah meneruskan jenjang pendidikannya, atau juga diangkat sebagai tenaga pengajar di daerah pedalaman dan sekaligus diwajibkan meningkatkan diri dengan mengikuti pendidikan keguruan jarak jauh sampai mencapai sedikitnya tingkat D-3. Para mantan wajib militer itu juga bisa ditawarkan program transmigrasi dengan rumah dan tanah garapan.

Program wajib latih dan wajib militer itu diadakan bukan karena kita menghadapi musuh dan perlu mobilisasi rakyat, tetapi merupakan program nasional sebagai bagian dari pendidikan anak bangsa yang memang harus dilaksanakan setiap tahun dalam rangka pembinaan generasi muda, sekaligus untuk mendukung *nation and character building* bagi masa depan bangsa yang lebih baik.